



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PROVINSI
(SUMATERA BARAT, RIAU, JAMBI, NUSA TENGGARA BARAT,
NUSA TENGGARA TIMUR)**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
MASA SIDANG V TAHUN 2021 - 2022**

Kamis, 30 Juni 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua;
Om Swastyastu;
Namo Buddhaya;
Salam Kebajikan.

Yth. Ibu Ketua DPR-RI, Seluruh Pimpinan dan anggota DPR-RI;
Pimpinan DPD-RI;
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional RI;
Menteri Keuangan RI;
Menteri Hukum dan HAM RI; serta
Hadirin yang saya hormati.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan serta bimbingan-Nya kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Provinsi menjadi Undang-Undang. Sesuai Surat DPR-RI Nomor B/12380/LG.01.03/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 hal Undangan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 Juni 2022, bahwa hari ini Rapat Paripurna DPR-RI salah satu agendanya adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi yang meliputi:

- 1. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;**
- 2. RUU tentang Provinsi Riau;**
- 3. RUU tentang Provinsi Jambi;**
- 4. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan**
- 5. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (ditetapkan 11 Maret 2022) dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan Surat Ketua DPR-RI Nomor B/3288/LG.01.01/2/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Bapak Presiden hal Penyampaian RUU Usul DPR-RI, Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Nomor R-18/Pres/04/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR-RI. Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Provinsi usul DPR-RI tersebut.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi serta Pimpinan DPD-RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan **RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur** yang sebelumnya diatur masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958) dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958).

Penyusunan RUU 5 (lima) provinsi tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi didalam 5 (lima) RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap kekhasan karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi-kultur, multi-etnis, multi-ras, dan bahkan multi-lanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Proses penyusunan kelima RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR-RI yang dilengkapi dengan Naskah Akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR-RI. Kesiapan atas inisiatif DPR-RI ini membuat Pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formil, dan substansi guna menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum diantara Komisi II DPR-RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), Pemerintah, dan Komite I DPD-RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan.

Proses lahirnya 5 (lima) RUU Provinsi ini mengadopsi substansi 7 (tujuh) UU Provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah menjadi model bagi penyelesaian produk UU oleh DPR-RI yang melibatkan Pemerintah, DPR-RI dan DPD-RI. Dengan pengesahan 5 (lima) UU Provinsi ini, selain menunjukkan kinerja DPR-RI yang amat produktif, efektif, dan efisien, Pemerintah juga menyambut baik karena semua UU ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya, seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena 5 (lima) UU ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu UUD Tahun 1945 pasca amandemen.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Akhirnya sekali lagi atas nama Pemerintah kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 5 (lima) RUU Provinsi dapat ditetapkan menjadi UU. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih,

Wabillahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaye.

Jakarta, 30 Juni 2022

MENTERI DALAM NEGERI